

JURNAL 

Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan

Media Analisis Masalah Pelayaran dan Kepelabuhanan

Fluktuasi Harga Minyak dan Pengaruhnya bagi Ekonomi Indonesia

Benny Agus Setiono

Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing
Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Benny Agus Setiono

Relevansi Pengembangan Pendidikan Vokasi dengan Kompetensi Terhadap Daya
Serap Angkatan Kerja

M. Taufik

Pengembangan Sistem Informasi Ekspor Barang

Ekka Pujo Ariesanto Akhmad

Customs Clearance Export PT. Arpeni Pratama Ocean Line Surabaya

Hardjono



JURNAL 
Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan
Media Analisis Masalah Pelayaran dan Kepelabuhanan

Susunan Dewan Redaksi

Pemimpin Umum
Pudji Santoso

Ketua Penyunting
Benny Agus Setiono

Wakil Ketua Penyunting
Ekka Pujo Ariesanto Akhmad

Anggota Penyunting
Ari Srientini
Kuncowati
M. Taufik
Mudiyanto

Mitra Bebestari
Sugeng Priyanto (Distrik Navigasi)
Sofyan Poli (BJTI)
Monika Retno Gunarti (BP2IP)

Kesekretariatan: Soendari, Didik Purwiyanto

Distribusi: I Made Dwinanto R., Makdin Sijabat

Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan diterbitkan sejak 1 September 2010 oleh Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan diterbitkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Maret dan bulan September. Redaksi menerima artikel ilmiah asli dalam bidang ilmu pelayaran dan kepelabuhanan.

Alamat Redaksi:
Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah
Jalan Arief Rahman Hakim 150
Surabaya 60111
Telepon (031) 5964596 | Fax. (031) 5964596, (031) 5946261
e-mail: jurnal_pdp@yahoo.co.id

JURNAL 
Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan
Media Analisis Masalah Pelayaran dan Kepelabuhanan

Daftar Isi

	Halaman
Fluktuasi Harga Minyak dan Pengaruhnya bagi Ekonomi Indonesia Benny Agus Setiono	1-13
Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Benny Agus Setiono	14-22
Relevansi Pengembangan Pendidikan Vokasi dengan Kompetensi Terhadap Daya Serap Angkatan Kerja M. Taufik	23-37
Pengembangan Sistem Informasi Ekspor Barang Ekka Pujo Ariesanto Akhmad	38-50
Customs Clearance Export PT. Arpeni Pratama Ocean Line Surabaya Hardjono	51-64

Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

(Indonesian economic studies nations strategy to achieve competitive advantage in toward an ASEAN Economic Community 2015)

Benny Agus Setiono

**Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Program Diploma Pelayaran,
Universitas Hang Tuah**

Abstrak: Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya akan dimulai pada 31 Desember 2015. MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Bagi Indonesia MEA akan menjadi peluang, karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah "Bagaimana Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Berdasar kondisi kualitas SDM dan data BPS, maka secara makro Strategi Pengembangan Indonesia *Labour Skilled* Menyongsong MEA 2015 lebih mengarah pada upaya: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan formal di pedesaan terutama bagi anak usia sekolah dan sekolah kejuruan dan keahlian, sehingga angkatan kerja memiliki kualitas yang handal untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan. 2) Penduduk usia kerja yang masih memiliki pendidikan rendah perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan yang sesuai dengan keunggulan di wilayahnya masing-masing. 3) Pengembangan sektor industri berbasis pertanian, sektor perikanan laut dan darat, pengembangan SDM guna mendukung pengembangan sektor industri jasa kreatif. 4) Kegiatan penyuluhan ke angkatan kerja muda, sekolah menengah umum/kejuruan dengan berbagai media dan sarana perlu dilakukan untuk membantu pemahaman dan kesiapan tenaga kerja muda dalam persaingan di pasar ASEAN. Guna meningkatkan kualitas daya saing industri pariwisata menghadapi persaingan ke depan, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara resmi mengumumkan (*launching*) 17 Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang akan melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Strategi pengembangan Industri Kreatif Menyongsong MEA 2015 dapat dilakukan dengan program: pengembangan kewirausahaan, peningkatan kemampuan pemasaran, akses kepada keuangan, akses kepada teknologi dan menciptakan kebijakan yang kondusif.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Abstract: Implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), whose implementation will begin on December 31, 2015. MEA will be a challenge for the Indonesian nation to transform ASEAN into a single market and production base, as well as make ASEAN a more dynamic and competitive. Enforcement of MEAs can also be interpreted as a hope for the prospects and opportunities for economic cooperation in different regions on a wider scale, through the regional economic integration of Southeast Asia, which is characterized by the free flow (*free flow*): goods, services, investment, labor, and capital. For Indonesia, the MEA will be opportunities for trade barriers will tend to decrease even be there. This will impact on the increase in exports, which in turn will increase the *Gross Domestic Product* (GDP) of Indonesia. the problem to be studied in this paper is "How to Achieve Competitive Advantage Indonesian nation in the ASEAN Economic Community Toward 2015". Based on the condition of the quality of human resources and the BPS, then the macro Indonesian Development Strategy Skilled Labour AEC 2015 be directed to: 1) Improving the quality of human resources through the strengthening of formal education in rural areas, especially for school-age children and vocational schools and expertise, so that the force work has superb quality to support the development of leading sectors. 2) The people of working age who still have low educational quality needs to be improved through training in accordance with excellence in their respective areas. 3) Development of agriculture-based industries, marine and inland fisheries sector, the development of human resources in order to support the development of creative services indusrti sector. 4) extension activities to the youth labor force, high school / vocational with various media and means need to be

done to help the understanding and readiness of young workers in the competition in the ASEAN market. In order to improve the quality competitiveness of the tourism industry to face competition in the future, especially the ASEAN Economic Community in 2015, the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf) officially announced (launching) 17 Business Certification Institute that will carry out the certification of tourism business. Development strategy Creative Industries Toward AEC 2015 can be done with the program: development of entrepreneurship, increase marketing capabilities, access to finance, access to technology and creating a conducive policy.

Keywords: ASEAN Economic Community (AEC)

Alamat korespondensi:

Benny A. S., Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan A. R. Hakim 150, Surabaya.
e-mail: jurnal_pdp@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan ekonomi global saat ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional Indonesia akan dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya akan dimulai pada 31 Desember 2015.

MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Dengan hadirnya MEA, Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri, sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi.

MEA mendatang perlu terus dikawal dengan upaya-upaya terencana dengan meningkatkan sinergitas, utamanya dalam meningkatkan dukungan menata ulang kelembagaan birokrasi, membangun infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia,

perubahan sikap mental serta meningkatkan akses finansial terhadap sektor riil yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi.

Bagi Indonesia MEA akan menjadi peluang, karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Pada sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI).

Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai gambaran, daya tarik investasi ke ASEAN lebih besar dari pasar global investasi antarnegara ASEAN.

Nilai investasi dari pasar global ke ASEAN mencapai USD67 miliar, jauh lebih tinggi dibanding nilai investasi antar negara ASEAN yang hanya USD26 miliar. Di samping itu, pemberlakuan MEA 2015 mendatang dapat dijadikan peluang bagi

peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat semakin meningkatkan size ekonomi kawasan, dimana dalam studi CSIS dan ADBI, diprediksi negara-negara ASEAN akan berpendapatan total USD5,4 triliun pada 2030.

Namun sebaliknya, pemberlakuan MEA 2015 akan dapat menjadikan Indonesia hanya menjadi pasar impor, dan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), apabila tanpa persiapan yang matang dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2014 dan Strategi Peningkatan Daya Saing, pemerintah RI terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Melalui Inpres tersebut, diinstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang akan dimulai pada 2015.

Berdasarkan dari uraian tersebut permasalahannya yang akan dikaji dalam makalah ini adalah Bagaimana Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ditinjau dari

1. Strategi Pengembangan Indonesia Labour Skilled Menyongsong MEA 2015.
2. Strategi Pengembangan Pariwisata Menyongsong MEA 2015.
3. Strategi Pengembangan KUKM (Industri Kreatif) Menyongsong MEA 2015.

Strategi Pengembangan Indonesia Labour Skilled Menyongsong MEA 2015

Jika dilihat dari sisi demografi Sumber Daya Manusia, Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* ini sebenarnya merupakan salah satu Negara yang produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70% nya merupakan usia produktif. Jika kita lihat pada sisi ketenagakerjaan Indonesia memiliki 110 juta tenaga kerja (data BPS, tahun 2007), namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas dan ketrampilan dengan tenaga kerja itu. Skema AEC 2015 tentang ketenagakerjaan, misalnya, memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas, seperti dokter, insinyur, akuntan dsb.

Masalahnya tenaga kerja kasar yang merupakan “kekuatan” Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. Justru tenaga kerja informal yang selama ini merupakan sumber devisa non-migas yang cukup potensial bagi Indonesia, cenderung dibatasi pergerakannya di era AEC 2015.

Dalam cetak biru AEC telah disepakati jaminan kebebasan mobilitas bagi tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN melalui serangkaian tahapan yang disepakati dalam *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) 1995. Tahapan-tahapan itu dibicarakan dalam dua tahun sekali sebagai forum koordinasi dan persiapan dalam liberalisasi jasa di kawasan ASEAN. Liberalisasi jasa di empat sektor prioritas, yakni jasa perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata, ditargetkan untuk 2010 dan jasa logistik pada 2013.

Liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan rampung pada 2015. Komitmen Indonesia dalam penjadwalan liberalisasi jasa tercantum dalam *Schedule of Specific Commitment* pada pertemuan AFAS paket ke-6 2007 meliputi jasa bisnis (jasa profesi seperti insinyur, akuntan,

jasa legal, arsitektur, konsultan manajemen, dan jasa penyewaan), jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa distribusi, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan perhotelan, jasa teknologi dan informasi, jasa energi, dan jasa periklanan. Untuk memfasilitasi liberalisasi jasa dan mempermudah mobilisasi tenaga kerja profesional lintas negara dalam kawasan ASEAN, dipandang perlu ada kesepakatan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang diwujudkan dalam nota saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangements (MRAs)).

Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan pada 72% tenaga kerja Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Hanya sebagian kecil (8%) dari komposisi tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing, 3% di antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan *semi-skilled worker* dengan pendidikan diploma dan kejuruan. Potret itu tentunya menjadi kegelisahan yang cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik *skillful labor* maupun *semi-skilled labor* akan semakin deras mendekati 2015.

Tugas pemerintah dan para pemangku kepentingan yang terkait ialah mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi linear dengan pembangunan manusia. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan

menentukan kualitas manusia dan tenaga kerja Indonesia.

Pertambahan angkatan kerja baru sebagai dampak dari struktur penduduk usia muda, sumbangan lulusan dunia pendidikan, PHK serta kondisi hubungan industrial berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ketenagakerjaan, termasuk terhadap angka kesempatan kerja dan potensi penambahan angka penganggur masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasar data BPS terdapat 2 sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sektor perdagangan dan pertambangan. Terkait dalam upaya pengurangan pengangguran, terlebih menyongsong Asean Community tahun 2015, Indonesia sesegera mungkin merampungkan kendala-kendala umum seperti ketidakcocokan antara kebutuhan dengan kualifikasi pencari kerja (*missmatch*), informasi lowongan kerja belum optimal (*misslink*) dan masih belum cocoknya lokasi dan jabatan yang ditawarkan dengan keinginan/harapan pencari kerja.

Upaya pembenahan hulu dan hilir, optimalisasi balai latihan kerja, pengakuan keahlian melalui sertifikasi dan penyebaran informasi kerja secara mudah dan cepat merupakan pekerjaan mendesak selain terobosan berupa adanya kerjasama dengan industri-industri pengguna tenaga kerja, perbaikan kurikulum dan mengembangkan kualifikasi *semi skill* dan *full skill labour* dengan dunia perguruan tinggi.

Berdasar kondisi kualitas SDM dan data BPS, maka secara makro Strategi Pengembangan Indonesia *Labour Skilled* Menyongsong MEA 2015 lebih mengarah pada upaya:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan formal di pedesaan terutama bagi anak usia sekolah dan

- sekolah kejuruan dan keahlian, sehingga angkatan kerja memiliki kualitas yang handal untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan.
2. Penduduk usia kerja yang masih memiliki pendidikan rendah perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan yang sesuai dengan keunggulan di wilayahnya masing-masing.
 3. Pengembangan sektor industri berbasis pertanian, sektor perikanan laut dan darat, pengembangan SDM guna mendukung pengembangan sektor industri jasa kreatif.
 4. Kegiatan penyuluhan ke angkatan kerja muda, sekolah menengah umum/kejuruan dengan berbagai media dan sarana perlu dilakukan untuk membantu pemahaman dan kesiapan tenaga kerja muda dalam persaingan di pasar ASEAN.

Strategi Pengembangan Pariwisata Menyongsong MEA 2015

Bidang sumber daya manusia sektor pariwisata Indonesia dinilai menjadi sektor yang paling siap menghadapi MEA 2015, karena sumber daya manusia bidang pariwisata memiliki lembaga sertifikasi yang mempunyai. Pada saat ini standar pengembangan sertifikasi yang diterapkan oleh asosiasi pariwisata di dalam negeri telah menjadi acuan bagi asosiasi bisnis pariwisata di tingkat ASEAN. Hal tersebut didorong oleh keunggulan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia dalam standar kompetensi profesi bidang pariwisata.

Sertifikasi Profesi di Bidang Pariwisata menurut Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012, adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar

husus. Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa mulai Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewajibkan para pekerja pariwisata untuk menguji kompetensi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata, yang menyatakan pengusaha pariwisata wajib memperkejakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Selanjutnya guna meningkatkan kualitas daya saing industri pariwisata menghadapi persaingan ke depan, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara resmi mengumumkan (*launching*) 17 Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) pariwisata yang akan melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Dengan kehadiran 17 Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, diharapkan mendorong dipenuhinya standar usaha dan peningkatan kualitas layanan pelaku usaha di sektor pariwisata yang otomatis juga akan meningkatkan daya saing industri pariwisata nasional.

Kehadiran LSU merupakan implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mensyaratkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar.

Setelah itu ada PP Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata yang mengatur pendirian LSU, pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan. Permen tersebut mewajibkan pelaku industri untuk melakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata

agar profesionalisme pengelolaannya bisa memenuhi standar usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Profesionalitas ini sangat penting agar potensi besar Indonesia di bidang pariwisata yang sangat besar bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk bagi pengembangan budaya.

Saat ini sudah ada 24 standar usaha pariwisata (antara lain; hotel, jasa perjalanan, restoran, karaoke, taman rekreasi, wisata selam, informasi pariwisata, spa, konsultan pariwisata) dari 56 jenis standar usaha Pariwisata, dan ditargetkan akhir bulan September akan ada 4 standar usaha lagi yang ditetapkan (Villa, Perahu Layar, Arena Permainan dan Lapangan Golf).

Sisa standar akan dilengkapi pada tahun 2015. Mengutip penilaian World Economic Forum (WEF), daya saing industri pariwisata Indonesia mengalami peningkatan cukup besar dalam tiga tahun terakhir sehingga posisinya naik dari 74 pada 2011 ke 70 pada 2013 dari 152 negara di dunia. Sedangkan untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi ke empat sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan daya saing agar sektor ini berpeluang untuk mendapatkan manfaat besar pada saat diberlakukannya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.

Diberlakukannya MEA itu juga membawa konsekuensi yang besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia termasuk sektor Pariwisata, karena pada era tersebut lalu lintas barang dan jasa termasuk mobilitas tenaga kerja di Negara anggota ASEAN menjadi keniscayaan.

Persaingan kesempatan usaha dan berusaha khususnya peningkatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sangat tinggi, untuk itu kata kuncinya antara lain melaksanakan

implementasi standar kompetensi tenaga kerja dan standar usaha di bidang pariwisata. Karena itu kehadiran LSU ini sangat strategis. Peningkatan profesionalisme pelaku pariwisata akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya industri pariwisata Indonesia, sehingga dapat menciptakan kesempatan usaha dan berusaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat lokal di berbagai destinasi pariwisata Indonesia.

Ke 17 LSU Bidang Pariwisata yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas rekomendasi Komisi Otorisasi Usaha. Komisi ini keanggotaannya berasal dari kalangan praktisi, akademisi, organisasi kepariwisataan termasuk sejumlah pejabat dari Kemenparekraf.

Dengan kehadiran LSU ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target kunjungan 25 juta wisata mancanegara (wisman) dan pergerakan 371 juta wisata nusantara (wisnus) pada 2025.

Selanjutnya ditargetkan pada 2025 mendatang sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi sebesar 6% terhadap PDB dengan perolehan devisa dari wisman sebesar US\$ 17 miliar dan pengeluaran wisnus sebesar Rp359,7 triliun per tahun.

Pemerintah Indonesia harus optimis, jika tidak ada kendala besar menghadang, target itu bisa tercapai mengingat dalam iklim usaha sektor pariwisata mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai gambaran, kunjungan wisman pada 2013 lalu sudah mencapai 8,8 juta dengan pertumbuhan rata-rata 8,39% dalam lima tahun terakhir, jauh di atas pertumbuhan dunia sekitar 5%. Tahun ini kunjungan wisman diperkirakan sudah mendekati 10 juta

orang, dan tidak tertutup kemungkinan untuk bisa menembus angka tersebut.

Secara keseluruhan, tahun 2013 pertumbuhan sektor pariwisata sebesar 6,72% di atas pertumbuhan PDB 5,81% sehingga kontribusinya terhadap PDB naik 2,92% pada 2012 menjadi 3,02% pada 2013. Kontribusi terhadap penerimaan devisa juga naik tajam mencapai US\$10,05 miliar pada 2013 sehingga posisinya sebagai penghasil devisa terbesar naik dari posisi 5 pada 2012 ke posisi ke 4 pada 2013.

Penyelenggaraan LSU pariwisata ini merupakan era baru menuju industri pariwisata Indonesia yang berdaya saing global menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean akhir tahun 2015. LSU bidang Pariwisata, sebagai lembaga mandiri dan independen memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi usaha pariwisata yang diterbitkan, serta melakukan pemeliharaan kualitas standar usaha yang diaudit melalui kegiatan pengawasan (*surveillance*).

Sebagai jaminan atas penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, diharapkan Komisi Otorisasi Usaha Pariwisata yang dikelola oleh insan-insan pariwisata terpilih akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan konsisten dalam rangka mewujudkan terselenggaranya sertifikasi usaha yang kredibel, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global, khususnya di Negara-negara ASEAN.

Strategi Pengembangan KUKM (Industri Kreatif) Menyongsong MEA 2015

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai

42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen.

Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen. Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.

Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.

Strategi pengembangan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Industri Kreatif Menyongsong MEA 2015 dapat dilakukan dengan program: pengembangan kewirausahaan, peningkatan kemampuan pemasaran, akses kepada keuangan, akses kepada teknologi dan menciptakan kebijakan yang kondusif.

Dalam rangka menuju MEA tahun 2015, terdapat peluang yang besar bagi UKM untuk meraih potensi pasar dan peluang investasi harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM menghadapi MEA adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang jitu guna memenangkan persaingan.

Oleh karena itulah, mulai saat ini UKM harus mulai berbenah guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Para pelaku UMKM tidak boleh lagi harus mengandalkan buruh murah dalam pengembangan bisnisnya.

Kreativitas dan inovasi melalui dukungan penelitian dan pengembangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kerjasama dan pembentukan jejaring bisnis, baik di dalam dan di luar negeri sesama UKM, maupun dengan pelaku usaha besar harus dikembangkan. Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan mereka agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan MEA pada tahun 2015.

Strategi Pengembangan KUKM (Industri Kreatif) Menyongsong MEA 2015 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses finansial

Memberikan informasi yang luas tentang skema-skema pembiayaan yang dimiliki perbankan guna peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UKM, perbankan serta pendamping UKM.

2. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM

Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah terlebih lagi spirit kewirausahaannya. Untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UKM di Indonesia, maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, dan diklat yang sesuai dengan kebutuhan serta langkah konkrit dalam penyusunan *grand strategy* pengembangan kewirausahaan.

3. Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi

Bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif. Kerjasama atau kemitraan antara

perusahaan besar, baik dari dalam dan luar negeri dengan UKM harus didorong untuk alih teknologi dari perusahaan besar kepada UKM, serta pengembangan model klaster untuk alih teknologi kepada dan antar UKM.

4. Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri

Pemberian informasi dan promosi produk-produk UKM, khususnya untuk memperkenalkan di pasar ASEAN harus ditingkatkan. Promosi produk, bisa dilakukan melalui dunia maya atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri.

5. Meningkatkan nilai tambah produk

Program prioritas pusat dan daerah diarahkan pada pengembangan *One Village One Product* (OVOP), industri kreatif dan penumbuhan kewirausahaan, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UKM.

6. Memanfaatkan keunggulan potensi UKM

Dalam konteks MEA 2015 ke depan terbuka peluang pasar bagi produk UKM mengingat produk UKM memiliki keunggulan tersendiri yang didukung potensi sumber daya alam yang besar, penduduk usia produktif yang memadai dan investasi yang didorong pada pengembangan industri nasional ke arah terbentuknya Indonesia sebagai *productional base* kawasan ASEAN yang ditopang pasar domestik yang besar.

7. Pemberdayaan koperasi dan UKM

Langkah pembenahan manajemen, SDM dan pembiayaan serta menata ulang kembali koperasi dan UKM, sehingga ke depan

koperasi dan UKM mampu tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang berdaya saing menyongsong MEA 2015.

8. Dukungan program bantuan sosial dalam pengembangan koperasi dan UKM

Dibutuhkan sebuah dukungan nyata guna pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional, Penataan PKL, UKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Pendamping Koperasi Lapangan, Pengembangan OVOP, Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Startup Capital bagi Wirausaha Pemula dan Bansos bagi koperasi perkotaan dan pedesaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan perekonomian Indonesia, jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN.

Pengusaha Indonesia harus mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Disamping itu orientasi kebijakan industri nasional harus berubah, tidak lagi berorientasi jangka pendek seperti memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik minat investor, khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni meningkatkan daya saing industri nasional, dengan atau tanpa investor asing.

Saran

Pembaruan dan perubahan menjadi sebuah kata kunci yang mesti segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap, mengingat kemajuan dan keanekaragaman karakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia, serta menghindari terjadinya tumpang-tindih antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang

selalu mendasarkan pengambilan keputusan berbasis otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- T. H. Tambunan, Tulus. 2013. *Kebijakan Industri dalam menyongsong ME-ASEAN 2015*. Departement for Business and Diplomatic Studies. *Parpol dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. No.8. Mei 2013.
- Siaran Pers. 2013. *Peningkatan Daya Saing Kunci Kesuksesan MEA 2015*. 5 September 2013. Jakarta
- H, Dhenny dan Pazli. 2013. *Peluang dan tantangan Indonesia dalam Keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*.
- Sholeh. 2013. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. 1(2):509-522
- Bustami, Gusmardi. 2009. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*.
- Kurniati, Kiki. 2011. *Implementasi AEC Blueprint di Indonesia menuju Terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015*. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Universitas Jambi.